

SKRIPSI

KONSEKUENSI YURIDIS ATAS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP SK MENKUMHAM TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK ATAS DASAR PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI

(Studi SK Menkumham No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 Tanggal 23 Maret tentang Pengesahan Perubahan AD/ART serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar)



Diajukan oleh :

MARIANUS MENDROFA

NPM : 120510896
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
KONSEKUENSI YURIDIS ATAS PUTUSAN PERADILAN
TATA USAHA NEGARA TERHADAP SK MENKUMHAM
TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN PARTAI
POLITIK ATAS DASAR PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI
(Studi SK Menkumham No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 Tanggal 23 Maret tentang
Pengesahan Perubahan AD/ART serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar)



Diajukan oleh :

MARIANUS MENDROFA

NPM : 120510896
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 26 November 2015

Dosen Pembimbing,



DR. W. RIAWAN TJANDRA, S.H.,M.HUM

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
KONSEKUENSI YURIDIS ATAS PUTUSAN PERADILAN
TATA USAHA NEGARA TERHADAP SK MENKUMHAM
TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN PARTAI
POLITIK ATAS DASAR PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI
(Studi SK Menkumham No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 Tanggal 23 Maret tentang
Pengesahan Perubahan AD/ART serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 11 Desember 2015
Tempat : Ruang Dosen Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.
Lantai II Fakultas Hukum Universitas Atma
Jaya Yogyakarta.

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum

Sekretaris : Y. Hartono, S.H., M.Hum

Anggota : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



.....
ENDRO SUSILO, S.H., L.LM

HALAMAN MOTTO

**“ borota wa’atuatua ba fangataufi lowalangi ”
(pesanBapak dan Mama)**

**Untuk menunjukkan yang lebih pas maka harus ada perubahan pada sikap
“ langsung berubah” (bang 1)**

**sukses memerlukan syarat. untuk menjadi sukses, anda harus berani
melewati suatu kondisi yg sulit (bang 2)**

**Seorang pemimpin haruslah berani dan mampu menunjukkan
kemampuannya kepada orang banyak, agar kita mendapatkan banyak relasi
(bang 3)**

**Apa yang aku dapatkan sekarang merupakan perjuangan kami bersama-sama
oleh keluarga dan saudara-saudaraku, karna kami menerapkan persatuan
dan kesatuan dalam keluarga (bang 4)**

**Semakin tinggi pengetahuan seseorang maka semakin tinggi pula rasa
kebersamaan dan persatuan yang ia ciptakan dalam lingkungannya (kakak
sayang dan kakak 2)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ⊖ Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan pertolongannya sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan ini dan dapat menyandang gelar sarjana.
- ⊖ Kepada Bapak dan Mama yang sungguh luar biasa dalam hidup penulis, berkat perjuangan dan komitmen bapak dan mama untuk mensekolahkan seluruh anak-anaknya kini sudah tercapai terlebih-lebih penulis bisa kuliah dan mendapatkan ijazah seperti abang dan kakak yang sudah duluan sukses. Terimakasih bapak dan mama atas perjuangan dan kasih sayang bapak dan mama berikan kepada kami semua anak-anakmu.
- ⊖ Kepada satu keluarga yaitu abang Yustinus Mendrofa, SE., ATT- II, kakak Teti Krisnawati Harefa, S.Pd dan juga kepada putri kami yang cantik Wisna terimakasih banyak bang/kakk atas dukungan dan semangat yang kalian berikan kepada penulis baik materil maupun moril, semoga terus bertambah rejeki dan juga sukses buat abang 1 agar menjadi pelayar yang handal.
- ⊖ Kepada satu keluarga yaitu abang Yatafao Mendrofa, S.S dan kakak Menta terimakasih bang dan kakak atas dukungan dan motivasi yang kalian berikan kepada penulis, semoga keluarga diberkati dan ditambahkan rejeki yang berlimpah dan juga cepat dapat momongan.
- ⊖ Kepada abang penulis yaitu bang Finsensius F. Mendrofa, SH, secara khusus penulis sampaikan dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada abang 1, abang 2 dan kakak semua. terimakasih banyak bang atas usaha dan dukungan abang kepada penulis atas perjuangan abang penulis dapat melanjutkan kuliah

sehingga penulis dapat mengikuti jejak abang dan kakak semua. semoga kebersamaan di jogja dan kembali saat di Jakarta, terimakasih pak Pengacara sukses terus. dan juga penulis berterimakasih kepada kakak Asni Zalukhu yang juga memberikan semangat kepada penulis.

- ⊖ Kepada satu keluarga abang dan kakak A/I Elvin Ndruru dan ponakan penulis Elvin, Ansel dan Joy, terimakasih bg/kk atas dukungan dan semangatnya semoga keluarga diberkati tuhan dan dipenuhi rejeki.
- ⊖ Kepada satu keluarga abang dan kakak A/I citra Laia dan juga ponakan penulis yaitu Citra Laia, terimakasih banyak abang dan kakak atas dukungan yang kalian berikan baik materil maupun moril sehingga penulis tetap semangat dalam menyelesaikan tulisan penulis, semoga keluarga diberkati oleh tuhan dan dilimpahkan rejeki yang banyak.
- ⊖ Kepada yang spesial buat adek Nestilima Zega, terimakasih dek telah menjadi yang spesial dalam hidup penulis terimakasih juga semangat dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ⊖ Kepada Nenek dan juga semua saudara-saudara yang ada di Nias yang tidak satu persatu penulis sebutkan, Terimakasih untuk semua dukungannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan, karna hanya atas rahmat dan pertolongannya sehingga penulis dimampukan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sekalipun banyak rintangan yang penulis hadapi namun semuanya berjalan lancar.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk syarat mendapatkan gelar kerserjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang secara substansial penulis ingin mengkaji Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan topik kajian tentang “Konsekuensi Yuridis atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap SK Menkumham tentang Penetapan Kepengurusan Partai Politik atas dasar Putusan Mahkamah Partai”(Studi SK Menkumham No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 Tanggal 23 Maret tentang Pengesahan Perubahan AD/ARTserta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar).

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada Bapak Dr. W.Riawan Tjandra, S.H.,M.HUM, selaku dosen pembimbing yang selalu mendorong penulis untuk mempercepat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah mendukung penulis dalam mempersiapkan penelitian ini, yaitu :

1. Bpk. Dr. G. Sri Nurhantanto, SH.,L.LM, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Bpk. FX. Endro Susilo, S.H.,L.LM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bpk. Dr. W.Riawan Tjandra, S.H.,M.HUM, selaku dosen pembimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih banyak pak atas bimbingan dan arahan serta dukungan dari bapak, semoga bapak cepat menjadi profesor.
4. Kepada Ibu E.Imma Indra Dewi W. S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing akademik penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Kepada Sr.M.Natalia,OP dan Sr. Teresa Tri Astuti, OP, selaku pendamping penulis dalam program PSSB (Program Seleksi Siswa Berprestasi) Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kepada ibu Dra. Ch. Suryanti, M.Humyang selalu membimbing dan memotivasi penulis selama kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen/Karyawan/Perpustakaan FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membimbing, mendidik dan memberikan ilmunya dengan tulus selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Kepada Bapak Yasonna Hamonangan Laoly, SH.,M.Sc.,Ph.D (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 2014-2019), sebagai narasumber penulis.
9. Kepada Bapak Sarjoko.,SH.,MH (Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta), sebagai narasumber penulis.

10. Kepada Ibu Siti Ghoniyatun, SH (Komisioner KPU DIY bidang Ketua Devisi Hukum, Pengawasan, dan Hubungan Antar Lembaga), sebagai narasumber penulis.
11. Kepada semua kawan-kawan Ikatan Mahasiswa Nias Ya'ahowu Universitas Atma Jaya Yogyakarta (IMANI Ya'ahowu UAJY).
12. Kepada semua Pengurus dan juga seluruh Masyarakat Nias yang ada di jogja yaitu Ikatan Keluarga Nias DIY.
13. Kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata angkatan 68 Kelompok 102 Kleben Samigaluh, Kulon Progo yaitu: Ade Kurniawan, Angela Rahmawati, Gregorius Andri Krisna Murti, I Gede Rescue Canninggia Darma, Klara Dwi Haryati, Nocolaus Natamanael H, Niken dan Yessica Anna Natasia.

Penulis menyadari bahwa selama penelitian ini ada banyak kekurangan dan kelemahan dari penulis maupun disebabkan faktor lain di luar kendali penulis, oleh karena itu penulis mohon agar dapat dimaklumi karna penulis generasi baru intelektual yang masih membutuhkan masukan dari berbagai kalangan. Demikian ucapan terima kasih dan sekaligus kata pengantar dari penulis, terima kasih atas perhatiannya.

Yogyakarta, 12 November 2015

Penulis

Marianus Mendrofa

ABSTRACT

The development of administrative courts in Indonesia today has taken seriously interest of many people mostly on disputed decision that taken either by an entity or an administrative official that became the object of lawsuit by an individual or a private legal entities who suffered losses. The writer takes "juridical consequences of the decision of administrative courts against the decree of the minister of law and human rights about the establishment of a political party's management ruling based on verdict of political party's court". Formulation of the problem on this writing is how the consideration of administrative courts in dealing with law and human rights ministry's decree and how the juridical consequences of the decision of the state administration on political parties. Aim of this research is to find out the law consideration the verdict of the state administration in prosecuting minister of law and human rights decree so to examine the juridical concerns following the verdict of administrative courts. The writer took normative legal research as the type of the research, also descriptive research as the nature. Result collected by the research is there is a moratorium on the minister of law and human rights decree, also a legal verdict finalized as well by the legal consideration of administrative court, there is also no winning sides based on the verdict unless an abolition to the minister of law and human rights decree, and the juridical consequences that occurs due to the decree's moratorium repercussions for the political party in nominating candidates for regional election because the electoral commission is not bound by interim decision but at the last law and human rights minister's decree.

Key words: law consideration, juridical consequences, administrative courts verdict, state administration decision, political party court verdict.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN ABSTRACT.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.....	19

BAB II :PEMBAHASAN

PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP SKMENKUMHAM TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK ATAS DASAR PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI

A. Tinjauan umum tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Menkumham dan Mahkamah Partai.....	21
1. Peradilan Tata Usaha Negara	
a. Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara.....	21
b. Tugas dan Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara.....	23
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi	
a. Kedudukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	26
b. Tugas dan Fungsi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	28
3. Mahkamah Partai Sebagai Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik	
a. Kedudukan Mahkamah Partai Politik.....	29
b. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Partai.....	31
B. Dasar Hukum Pertimbangan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menangani Kasus SK Menkumham Atas Dasar Putusan Mahkamah Partai	
1. Tinjauan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).....	32

2. Dasar Hukum dari Pertimbangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam menangani SK Menkumham sebagai obyek gugatan.....	44
a. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.....	47
b. Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.....	56
c. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung.....	59
C. Perbandingan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menangani Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	
a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.....	60
b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Banding).....	62
c. Putusan Mahkamah Agung (Kasasi).....	63
D. Konsekuensi Yuridis atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Partai Politik dan Komisi Pemilihan Umum	
1. Konsekuensi Yuridis Atas Peradilan Tata Usaha Negara.....	64
a. Putusan Sela	66
b. Putusan Berkekuatan Hukum Tetap	71
2. Analisis Penulis terhadap Pertimbangan Hukum dan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara serta Konsekuensi Yuridis	73

BAB III : PENUTUP

A. Simpulan.....	78
------------------	----

B. Saran.....	80
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.....	82
B. Peraturan perundang-undangan.....	82
C. Peraturan Presiden Republik Indonesia.....	83
D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum.....	83
E. Putusan Pengadilan.....	84
F. Surat Keputusan.....	84
G. Website.....	84
H. Majalah Ilmiah.....	84
I. Kamus	84

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Kronologis Studi Kasus.....	44
-----------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bukti Penelitian
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 490 K/TUN/2015



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 November 2015

Yang menyatakan,

Marianus Mendrofa